

BAB V

KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memunculkan kembali kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Terdapat beberapa hal yang menurut penulis dapat ditarik kesimpulan. Selain itu bagian ini juga sedikit menjelaskan terkait jawaban atas pertanyaan penelitian pada bab sebelumnya.

Rohingya merupakan nama sebuah etnis yang mendiami wilayah Arakan, yang berlokasi di sebelah barat Myanmar dan lokasinya berbatasan langsung dengan Bangladesh. Dari 135 etnis yang berada di Myanmar, Rohingya adalah salah satu etnis yang ada di dalamnya. Etnis Rohingya ini mendapat predikat dari PBB sebagai *the most persecuted minority* dan juga mendapat julukan *the Gypsies of Asia*.¹¹⁵ Alasan predikat tersebut muncul dengan alasan bahwasannya etnis Rohingya ini banyak mendapatkan tindakan diskriminasi dari masyarakat bahkan juga dari pemerintahannya. Banyak etnis yang ada di Myanmar yang mendapatkan tindakan diskriminasi seperti Christian Karen, Chin, Kachin dan Mon Etnis. Namun bedanya dari etnis lain adalah, muslim Rohingya tidak diberikan hak kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar.

Etnis Rohingya adalah penduduk asli negara bagian Arakan. Arakan sendiri adalah negara bagian yang terletak di barat Myanmar. Arakan dulunya merupakan

¹¹⁵B. Philip, „The Most Persecuted Minority in the World: The Gypsies of Asia“, The World Crunch (daring), 26 Juni 2012, dalam (<http://www.worldcrunch.com/most-persecutedminority-world-gypsies-burma/world-affairs/the-most-persecuted-minority-in-the-world-thegypsies-of-burma/c1s5701/>), diakses 5 september 2014

sebuah Negara Independent yang pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Budha dan muslim. Setelah dikuasai oleh Islam sejak itulah pengaruh Islam masuk ke Arakan hingga pada akhirnya pada tahun 1430 M Arakan menjadi sebuah Negara muslim.

Etnis Rohingya merupakan etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan mengalami banyak penindasan. Oleh karena itu banyak dari mereka yang melarikan diri ke berbagai negara tetangga untuk mendapatkan suaka dari negara tersebut. Dalam hukum internasional, sudut pandang pertama yaitu dilihat sudut pandang sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan yang kedua yaitu etnis Rohingya yang keluar dari negara asalnya untuk mencari perlindungan atas penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka.

Pada tahun 1982 pemerintah yang sedang berkuasa yaitu pemerintahan junta militer mengeluarkan sebuah dekrit mengenai peraturan per Undang-undangan Kewarganegaraan Myanmar. Dimana undang-undang kewarganegaraan adalah dasar warga Negara dapat mengikuti dan menikmati segala kebijakan yang diberikan kepada pemerintah. Sehingga dampak dari dikeluarkannya dekrit tersebut masyarakat dapat memperoleh kemudahan di berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, social hingga perpolitikan. Namun berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Rohingya, mereka tidak mendapatkan sebuah status kewarganegaraan, mereka dicoret hak kewarganegaraannya sehingga mereka menjadi (*stateless*). Ne Win mengatakan bahwa muslim Rohingya adalah rakyat tanpa Negara (*people without state*).

Kebijakan tersebut membuat kaum muslim Rohingya semakin mengalami penindasan, penyiksaan, tekanan, bahkan hingga kematian di tangan penguasa tirani militer. Pembunuhan yang tidak terhitung jumlahnya, pelecehan terhadap wanita Islam, tindakan penangkapan yang sewenang-wenang, pengurungan penjara, serta perlakuan dengan cambuk hingga hukuman mati yang semena-mena. Selain itu pemerintah juga menghilangkan segala atribut berbau keislaman, sehingga, muslim dilarang untuk memelihara janggut, memakai kopiah dan penutup kepala lainnya, wanita dilarang menggunakan jilbab. Akibatnya, sekitar 20.000 muslim Rohingya dibunuh oleh rezim militer di antara tahun 1962 sampai tahun 1984.

Selama ini pemberitaan yang ada mengenai etnis ini lebih kepada penderitaan apa saja yang telah mereka dapatkan, bukan perlawanan atau respon apa yang mereka lakukan. Memang etnis ini merupakan etnis yang dianggap PBB sebagai etnis yang paling teraniaya. Tetapi pada kenyataannya, dari semenjak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, setidaknya etnis ini juga melakukan beberapa perlawanan. Perlawanan yang dilakukan etnis muslim Rohingya ini antara lain melakukan pemberontakan, migrasi hingga penolakan identitas dengan disebut sebagai etnis Bengali. Perlawanan yang dilakukan oleh warga muslim Rohingya ini bisa dibagi berdasarkan dua periode yaitu pada masa pemerintahan Junta Militer dan Masa Transisi Demokrasi.

Pada masa pemerintahan Junta Militer muslim Rohingya mengalami banyak penindasan seperti Penyerangan terhadap masyarakat muslim dilanjutkan dengan perusakan fasilitas fasilitas yang dianggap sebagai tempat perlindungan oleh

masayarakat Rohingnya. Portal berita Aljazeera memberitakan sekitar 5.000 bangunan milik etnis Rohingya rusak akibat dari tindakan pengrusakan tersebut. Setidaknya sekitar 70 warga Rohingya termasuk 28 anak-anak terbunuh di *Mrauk-U township*.

Di sisi lain banyak pula muslim Rohingya yang merasa tidak nyaman akan tindakan yang dilakukan Junta Militer terhadap mereka, sehingga banyak dari mereka mencoba melarikan diri ke berbagai negara untuk mencari perlindungan dan berharap diberikannya suaka terhadap mereka. Negara yang akan menjadi tujuan mereka adalah negara Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia bahkan hingga Australia. Mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal kayu selama berhari-hari. Bahkan banyak dari mereka yang terdampar hingga kapalnya karam akibat menabrak karang, sehingga banyak pula yang telah meninggal akibat dari perjalanan mereka tersebut.

Adapun secara singkatnya, perlawanan yang dilakukan oleh warga muslim Rohingya bisa dikatakan berbeda berdasarkan periode masa pemerintahan begitupun dengan faktor yang mendukungnya. Terlihat bagaimana tipe perlawanan maupun faktor yang melatarbelakanginya. Situasi dunia internasional bisa dikatakan mendukung (faktor eksternal) mengingat pada masa Junta Militer merupakan era Perang Dingin dan juga banyaknya negara-negara lain yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah mereka dengan cara seperti pemberontakan. Dan ketika pada masa Pro Demokrasi, tatanan dunia pun mulai berubah. Dimana Myanmar mencoba menjadi negara yang lebih terbuka dan juga mulai menghargai konsep-konsep HAM.

Walaupun belum maksimal, tetapi hal ini tercermin dengan lebih beraninya etnis-etnis minoritas seperti muslim Rohingya yang tetap mempertahankan identitas mereka sebagai Rohingya, bukan Bengali.

Selain itu dapat dilihat pula penyebab terjadinya perlawanan yang ada yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri baik pada masa junta militer dan transisi demokrasi sama-sama tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Pada masa junta militer, pemerintahan masa itu merepresi tidak hanya etnis muslim Rohingya tetapi seluruh etnis minoritas selain etnis Burma. Sehingga kaum muslim Rohingya beserta etnis minoritas lainnya melakukan perlawanan dengan cara pemberontakan. Begitupun alasan etnis muslim Rohingya melakukan migrasi, yang disebabkan oleh tindakan represif pemerintah Junta Militer. Sedangkan pada masa pro demokrasi, faktor internal antara lain konflik antar etnis. Memang disini campur tangan pemerintah tidak terlibat secara langsung. Tetapi mengingat konflik Rakhine yang terjadi pada Juni 2012 dan Oktober 2012 mengindikasikan bahwa pemerintah melanggengakan terjadinya konflik sipil tersebut.

Selain perlawanan yang terjadi dalam beberapa gaya tersebut tentunya terdapat organisasi yang menjadi wadah muslim Rohingya dalam mendapatkan haknya sebagai warganegar, seperti organisai *Arakan Rohingya National Organization* (ARNO) dan juga *Arakan Rohingya Islamic Front* (ARIF) yang menjadi motor penggerak bagi muslim Rohingya dalam mendapatkan hak mereka paska berlakunya undang-undang kewarganegaraan yang dikeluarkan pada tahun

1982. Warga arakan dan etnis Burma mencap warga muslim rohingya sebagai teroris yang bergerak dibawah jaringan Al-Qaeda. Meskipun hal ini tidak mungkin tetapi ada organisasi Islam yang juga terhubung dengan Taliban maupun Al-Qaeda. Adapun pelatihan warga muslim rohingya dan juga kamp-kamp pelatihannya sempat didokumentasikan.